

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN JAYAPURA**

MUHAMMAD RAFIE Z. BAY

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Soekarno Hatta KM.20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Email: rafibay41@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Jayapura Regency is an area that has a high level of vulnerability to natural disasters. Natural disaster events that occur include landslides, earthquakes, flash floods and even the impact of a potential tsunami. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the role of the Regional Disaster Management Agency of Jayapura Regency in the post-disaster field. **Method:** This study uses a qualitative method. This study uses data collection techniques consisting of interviews, observation and documentation. The analytical techniques used include data reduction, data presentation, verification and conclusions and conclusions.

Result: The results of this study explain that the role of the Regency BPBD in reconstruction and rehabilitation is quite good, based on the concept of rights and obligations supported by indicators. However, the Jayapura Regency BPBD has several obstacles in carrying out its role due to the lack of quality human resources, facility infrastructure, and coordination. There are several efforts to overcome the existing obstacles: conducting training in human resources, procurement of infrastructure to support the handling process, and improving the quality of coordination so that the data held can be appropriate and easier to manage. **Conclusion:** The role of BPBD is quite good and there are still obstacles in its implementation in the aftermath of the flood disaster and there are also efforts to deal with the obstacles faced.

Keywords: Role, rehabilitation and reconstruction, Jayapura Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Kabupaten Jayapura merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerawanan terhadap terjadinya bencana alam. Peristiwa bencana alam yang terjadi meliputi tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang bahkan dampak potensi tsunami. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura dalam bidang pasca bencana. **Metode:** Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis yang gunakan antara lain reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penyimpulan dan kesimpulan.

Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam peran dari BPBD Kabupaten dalam rekonstruksi dan rehabilitasi sudah cukup baik, berdasarkan konsep hak dan kewajiban yang didukung dengan indikator-indikator, tetapi BPBD Kabupaten Jayapura memiliki beberapa

hambatan dan kendala dalam melaksanakan perannya yaitu, kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya fasilitas sarana prasarana dan kurangnya koordinasi. Terdapat beberapa upaya dalam mengatasi hambatan yang ada yaitu melakukan pelatihan kepada sumber daya manusia, dan pengadaan sarana prasarana untuk mendukung jalannya proses penanggulangan, melakukan koordinasi dengan baik agar data yang dimiliki sesuai. **Kesimpulan:** Peran BPBD sudah cukup baik dan masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya dalam pasca bencana banjir dan juga terdapat upaya dalam menangani hambatan yang dihadapi.

Kata Kunci: Peran, rehabilitasi dan rekonstruksi, Kabupaten Jayapura

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan kepulauan yang letaknya secara geografis berada di daerah khatulistiwa, di antara Benua Australia dan Benua Asia serta berada di antara Benua Hindia dan Pasifik. Indonesia juga terletak pada pertemuan lempeng tektonik yang merupakan daerah atau wilayah rawan dengan terjadinya bencana. Indonesia yang memiliki iklim tropis atau basah (*humid tropic*) yang berarti memiliki ciri curah hujan yang tinggi apalagi pada musim penghujan. Akibat musim penghujan yang Panjang atau intensitas hujan yang tinggi dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir. Kabupaten Jayapura memiliki Luas 17.516.6 Km² yang terbagi atas 19 distrik, dan 139 kampung, Keadaan topografi dan lereng umumnya relatif terjal dengan kemiringan 5%-30% serta mempunyai ketinggian aktual 0,5m dpl -1500m dpl. Daerah pesisir pantai utara berupa dataran rendah yang bergelombang dengan kemiringan 0%-10% yang ditutupi dengan endapan alluvial. Secara fisik, selain daratan juga terdiri dari rawa (13.700 Ha). Sebagian besar wilayah Kabupaten Jayapura (72,09%) berada pada kemiringan diatas 41%, sedangkan yang mempunyai kemiringan 0-15% berkisar 23,74%. Kabupaten Jayapura, Papua, secara geografis merupakan daerah rawan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi dan tsunami. Pemerintah Kabupaten Jayapura mempunyai tugas dan tanggung jawab mensejahterakan semua warga di wilayah Kabupaten Jayapura. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Bencana banjir di Kabupaten Jayapura merupakan bencana yang masih sering terjadi dan belum terselesaikan hingga saat ini, peristiwa bencana banjir bandang pada tanggal 16 Maret 2019 di Kabupaten Jayapura-Sentani yang disebabkan oleh meluapnya air di penampungan Gunung Cyclop dikarenakan intensitas curah hujan yang sangat tinggi dan kurangnya daerah resapan. Banjir bandang Sentani, Jayapura yang terjadi pada 16 Maret 2019 lalu menelan korban:

Korban Hilang	Korban luka berat	Korban luka ringan	Meninggal dunia
17 Orang	768 Akumulasi sejak tanggal 16 Maret 2019	153 Orang	106 Jiwa, diantaranya: 85 Teridentifikasi, dan 21 belum teridentifikasi dan sudah diamankan.

Di samping itu, banjir menyebabkan kerusakan tempat lain seperti fasilitas umum, tempat ibadah, infrastruktur pendidikan, dan jembatan. Faktor yang menyebabkan banjir di Kabupaten Jayapura ada

2 (Dua) penyebab yaitu: Faktor Alam, Di Kabupaten Jayapura sering mengalami musim hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya bencana banjir. Aliran sungai tidak berfungsi dan terjadi kelongsoran. Faktor Non Alam, Karena pengalihan lahan daerah serapan yang dijadikan pemukiman, dan juga kurang sadar dengan membuang sampah ditempatnya yang dapat memicu penyumbatan aliran air, dan penebangan pohon besar Ada 4 (Empat) Kecamatan di Kabupaten Jayapura yang terdampak parah yaitu Kecamatan Sentani Barat, Kecamatan Waibu, Kecamatan Sentani dan Kecamatan Ravenirara yang mengalami bencana banjir yang menyebabkan hanyutnya properti warga, kerusakan lingkungan dan timbulnya korban jiwa. Maka dari itu BPBD dalam menanggulangi pasca bencana banjir di Kabupaten Jayapura sangat penting.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penanggulangan bencana. Penelitian Nahrul Fhadilla yang berjudul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Jambi* (Nahrul Fhadilla, 2020) menemukan bahwa Peran BPBD Kota Jambi berjalan sesuai dengan visi dan misi. BPBD Kota Jambi tidak mengalami kendala yang berat dalam penanggulangan bencana banjir. Penelitian Henrika Riantika yang berjudul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang* (Henrika Riantika, 2021) menemukan bahwa Peran BPBD di Kabupaten dalam menanggulangi bencana sudah baik, dilihat dari penerapan prinsip manajemen yang baik, yaitu dilakukan sesuai dengan tuntutan keadaan, Adanya kondisi yang baik dengan instansi atau dinas terkait sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada kondisi yang baik dan saling mendukung serta dalam penanggulangan bencana melibatkan berbagai pihak secara seimbang. Penetapan Kebijakan: Tanggung jawab pemerintah dalam menetapkan kebijakan terhadap penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan mengambil sikap dan tindakan yang memberikan pelayanan ketika terjadi bencana, mendirikan posko tanggap darurat, dapur umum dan kebutuhan masyarakat lainnya. Pencegahan Bencana: Pelaksanaan pencegahan bencana atau meminimalisir terjadinya bencana banjir berfungsi untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul,antisipasi yang dilakukan pemerintah Daerah seperti pembuatan beronjong dan penguatan tebing. Tanggap Darurat: Pelaksanaan tanggap darurat yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan seperti pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat Kelurahan Lewaja yang terdampak bencana banjir. Rehabilitasi dan Rekontruksi: Pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pada masyarakat yang terdampak bencana banjir, yaitu pemasangan beronjong disepanjang sungai yang berada disekitar pemukiman warga akan tetapi tahap pertama pembangunan dilakukan baru di lokasi-lokasi vital karena jika sepanjang sungai yang akan ditangani otomatis membutuhkan dana yang besar sedangkan dana yang dimiliki terbatas sehingga rehabilitasi dan rekontruksi di Kelurahan Lewaja belum terpenuhi 100%. Penelitian Rizal wahyudha yang berjudul *Implementasi penanggulangan Bencana Banjir Oleh Provinsi DKI Jakarta* (Rizal wahyudha, 2018) menemukan Memaparkan hasil kesimpulan singkat penanggulangan banjir dalam pra bencana: (Kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana), saat bencana(tanggap darurat, penanggulangan bencana) dan pasca bencana (Rehabilitasi dan rekonstruksi)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti

mengenai peran, upaya serta program pasca bencana banjir yang dilaksanakan oleh BPBD. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang penanggulangan secara keseluruhan, serta mempunyai lokus penelitian yang berbeda dengan penelitian Nahrul Fhadilla, Henrika Riantika, dan Rizal wahyudha.

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah peneliti meneliti tentang peran dari BPBD dalam menanggulangi bencana, serta membahas tentang kendala yang dihadapi dari BPBD dalam menghadapi bencana, dan kesamaan lainnya adalah metode yang dipakai dari beberapa penelitian sebelumnya menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran BPBD dalam pasca bencana banjir, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mitigasi bencana tanah longsor, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPBD dalam pelaksanaannya dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

II. METODE

Menurut Strauss dan Corbin (1997), Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur atau cara-cara lain dari kuantitatif. Penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas social, sejarah dan lain-lain.

Pada penelitian kualitatif memiliki desain penelitian yang fleksibel atau bisa dimungkinkan untuk diubah agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Walaupun dikatakan fleksibel, desain penelitian kualitatif mengandung unsur-unsur penting seperti berikut Prof. Sukardi MS. PhD (2011)

1. Menentukan fokus penelitian.
2. Menentukan paradigma penelitian sesuai dengan keadaan lapangan.
3. Menentukan kesesuaian antara paradigma dengan teori yang dikembangkan sehingga peneliti tetap yakin kebenarannya karena teori yang digunakan saling berkaitan.
4. Menentukan sumber data yang dapat digali dari masyarakat yang diteliti.
5. Menentukan tahap-tahap penelitian.
6. Mengembangkan instrumen penelitian.
7. Merencanakan pengumpulan data dan pencatatannya.
8. Rencana analisis data termasuk Tindakan setelah peneliti mengumpulkan data dari para narasumber.
9. Rencana mencapai tingkat kepercayaan dan kebenaran penelitian, yang didalamnya terdapat cara peneliti mendapatkan data yang valid dan reliabel permasalahan yang diteliti.
10. Merencanakan lokasi dan tempat penelitian.
11. Menghormati etika penelitian.
12. Mempersiapkan laporan penelitian dan penyelesaian penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan peran BPBD dalam pasca bencana banjir di Kabupaten Jayapura menggunakan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan peran merupakan aspek aktif dari status. Apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya menurut kedudukannya sendiri, maka ia

memenuhi suatu peran. Dalam hal ini dengan melihat tugas dan fungsi BPBD. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Kabupaten Jayapura

Peran BPBD alam pasca bencana sangat penting, karena dalam tahap kita dapat menyimpulkan apa yang akan dilakukan setelah terjadinya bencana. Tahap pasca bencana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu rekonstruksi dan rehabilitasi. Dalam peran ini BPBD melakukan pembangunan (rekonstruksi) kepada daerah-daerah yang terkena bencana dan juga melakukan pemulihan (rehabilitasi) untuk meningkatkan banyak hal, seperti ekonomi, Kesehatan dan kondisi yang terdampak bencana.

3.1.1. Hak

Secara umum, semua hak adalah mutlak dan milik seseorang, yang pelaksanaannya tergantung pada orang itu dengan rasa tanggung jawab. Pengertian hak merupakan segala sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap individu, meskipun manusia itu masih dalam kandungan. Pemerataan merupakan kekuatan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima oleh suatu pihak dan pada hakikatnya tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

1. **Ketersediaan Anggaran**
anggaran adalah rencana organisasi yang merencanakan secara komprehensif dan dijabarkan dalam satuan moneter selama periode atau periode waktu yang telah ditetapkan. Anggaran juga sering dikatakan sebagai rencana keuangan karena anggaran yang disediakan dan ditetapkan dalam satuan moneter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura dalam ketersediaan anggaran penanggulangan pasca bencana banjir telah dianggarkan dalam rencana kerja anggaran (RKA). Anggaran yang dimiliki BPBD Kabupaten Jayapura cukup dalam penanggulangan bencana.
2. **Ketersediaan SDM**
sumber daya manusia adalah individu yang melakukan tugas sebagai penggerak di instansi dan perusahaan yang berfungsi sebagai aset, sehingga kompetensinya harus di beri pelatihan dan pembinaan. BPBD Kabupaten Jayapura memiliki 41 pegawai dengan latar belakang Pendidikan yang berbeda.
3. **Ketersediaan Sarpras**
Sarana dan Prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya suatu kegiatan, yang dapat berupa alat utama atau alat untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Padahal, sarana dan prasarana tidak hanya mencakup seperangkat alat atau benda, tetapi juga tempat atau ruangan untuk berlangsungnya kegiatan. Sarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Jayapura rata-rata dalam kondisi baik, tetapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan perlunya diadakan pengadaan sarana.

3.1.2. Kewajiban

Kewajiban adalah peran yang sifatnya imperatif atau harus dilakukan dan dilaksanakan. Jika kewajiban tidak dilakukan maka seseorang bisa dikenakan sanksi karena akan banyak pihak yang dirugikan jika kewajiban tidak dilaksanakan. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

1. Program

Program BPBD dalam penanggulangan pasca bencana, yaitu rekonstruksi dan rehabilitasi, program rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan melibatkan pihak yang menyediakan sumber daya baik dari Pemerintah Daerah melalui BPBD dan Pemerintah Pusat melalui BNPB. BPBD memiliki program bantuan yaitu pembangunan perumahan untuk korban bencana banjir yang tempat tinggalnya sudah tidak layak huni, dan juga pemberian bantuan material kepada masyarakat yang tempat tinggalnya masih bisa diperbaiki atau mengalami kerusakan kecil, bantuan yang diberikan dilakukangan dengan sosialisasi, pendataan dan verifikasi.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah proses rangkaian kegiatan, dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan tujuan dan rencana kerja yang disusun untuk semua elemen, bidang fungsional dan departemen, untuk secara efektif dan efisien menghasilkan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Dalam mengatasi masalah yang dimiliki BPBD, BPBD melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penanggulangan bencana banjir.

3. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses menanamkan nilai-nilai, kebiasaan, dan aturan perilaku sosial dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi itu sendiri, manusia menyesuaikan diri dengan peran dan status sosialnya dalam kelompok masyarakat. BPBD melakukan sosialisasi tentang program yang dilaksanakan oleh BPBD dan juga memberikan pemahaman tentang kebencanaan.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses mengidentifikasi indikator kinerja dan mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan terhadap kinerja yang telah ditentukan. Pengendalian adalah proses mengukur kinerja dan mengambil tindakan untuk memastikan hasil yang diharapkan. Pengawasan adalah proses memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai rencana. BPBD melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan agar sesuai dengan yang diinginkan atau mencapai tujuan.

3.2. Factor Penghambat dalam Pasca Bencana Banjir Di Kabupaten Jayapura

Adapun factor penghambat dalam pasca bencana banjir di Kabupaten Jayapura yang diidentifikasi berdasarkan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Sarana yang tidak memadai
2. Kurangnya koordinasi
3. Kualitas SDM yang rendah

3.3. Upaya dalam Pasca Bencana Banjir Di Kabupaten Jayapura

Adapun upaya yang dilakukan BPBD dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pasca bencana banjir Di Kabupaten Jayapura:

1. BPBD kabupaten Jayapura melakukan upaya untuk mengatasi masalah terkait koordinasi dengan melakukan pendataan ulang dilapangan yang valid sehingga pemberian bantuan yang diberikan tepat pada sasaran dan kendala tidak dapat terjadi kedepannya.
2. Dalam hal sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Jayapura dalam upaya yang di hadapi terkait masalah ini bekerjasama dengan OPD-OPD lainnya seperti Dinas Sosial untuk

- membantu kebutuhan logistik, Kesehatan untuk perawatan kepada para korban, BASARNAS, TNI POLRI untuk melakukan evakuasi dilokasi bencana.
3. Dalam hal meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, para pegawai menjalani pelatihan atau diklat yang berkaitan dengan kebencanaan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian yang berjudul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Jambi* (Nahrul Fhadilla, 2020) menemukan bahwa BPBD dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kota Jambi dalam pelayanannya telah dijalankan sesuai dengan visi dan misi, BPBD juga telah melaksanakan program pemetaan daerah rawan bencana, meskipun sifatnya menyeluruh mencakup seluruh Provinsi Jambi, dan BPBD Provinsi Jambi tidak mengalami kendala yang begitu serius dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Jambi, hanya saja BPBD kekurangan sarana prasarana dan sumber daya manusia apabila bencana datang bersamaan di beberapa wilayah.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan factor penghambat dalam pelaksanaan pasca bencana banjir di Kabupaten Jayapura yaitu salah satunya masih ada beberapa SDM yang dimiliki dengan kualitas yang rendah, dan juga terdapat sarana prasarana yang kondisi dalam keadaan kurang baik dan jumlah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Peran BPBD dalam penanggulangan pasca bencana banjir sudah terlaksana cukup baik, tetapi masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kualitas SDM yang dimiliki masih rendah pengetahuannya tentang kebencanaan, sarana prasarana masih belum cukup memadai. Dalam pelaksanaan peran BPBD Kabupaten Jayapura telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dimiliki, seperti meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan pelatihan atau diklat, dan melakukan pengadaan sarana prasarana atau bisa dengan berkerjasama dengan instansi lain untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti mengetahui masih kurang dalam temuan penelitian ini, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama dan berkaitan dengan peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Jayapura untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. KESIMPULAN

Ucapan terima kasih yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Jayapura serta jajarannya yang telah ikut membantu dalam penelitian ini dan seluruh pihak terkait yang telah ikut membantu menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Biddle, B.J. dan Thomas, E.J. 1966. *Role Theory : Concept and Research*. NewYork: Wiley.

Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke-2*. Jakarta: Bina Aksara.

Neuman, W. L., 2000. *Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative, approaches*. Boston: Allyn and Bacon., 2006. *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches, sixth edition*. Boston: Pearson Education.

Rahayu, Dkk. 2009. *Banjir dan Upaya Penanggulangannya*. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana (PMB-ITB).

Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Cetakan Kelima. Bandung: PT Refika Aditama.

Soekanto, S., 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta., 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta

Sujarweni, V. W., 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sukardi. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Z., 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tjandra. W. R. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

SKRIPSI DAN JURNAL

Fhadilla, Nahrul, Dkk. 2020. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Jambi, Skripsi Thesis*. Jambi: UIN Sulthan Saifuddin Jambi.

Riantika, Henrika. 2021. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wahyudha, Rizal. 2018. *Implementasi penanggulangan Bencana Banjir Oleh Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Alinea Ke-IV Pembukaan UUD RI 1945

Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

SUMBER LAINNYA

<https://bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>

<https://papua.go.id/view-detail-kabupaten-259/Profil-Kab.-Jayapura.html>

<https://papua.go.id/view-detail-kabupaten-260/gambaran-umum.html>

<https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-penanganan-pascabencana-banjir-bandang-sentani>

Renstra BPBD Kabupaten Jayapura 2017-2022

Laporan Penanganan Bencana Alam Di Kabupaten Jayapura

